

Surat Kabar : Media Indonesia

Edisi : 16 Desember 2014

Subyek : Sampah

Hal : 13

JAKARTA DONESIA BERSIH SAMPAH2020

INDONESIA siap menyongsong target menjadi negara tanpa sampah pada 2020 dengan menyiapkan 3.300 bank sampah. Saat ini bank sampah yang ada sudah 2.300 unit, dan sisanya akan dituntaskan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabar Ginting mengungkapkan ke 1.000 bank sampah yang akan didirikan sangat mendukung tercapainya Indonesia bebas sampah 2020.

“Bank sampah ini juga menjadi salah satu poin dalam penilaian bagi daerah untuk memperoleh piala Adipura,” katanya, di sela seminar nasional Inovasi Teknologi Lingkungan Dalam Aksi Gerakan Nasional Indonesia Bersih, yang digelar BPPT, di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan syarat mendapatkan Adipura, salah satunya adalah penilaian tertinggi dalam pengolahan sampah. Meski setiap tahun passing grade-nya berbeda-beda, pengolahan sampah memiliki nilai tertinggi yakni 14 poin dari 100 poin yang disyaratkan.

Sabar melihat saat ini ada kecenderungan setiap daerah mulai bergerak menciptakan daerahnya bersih dan sehat, bukan sekadar berambisi meraih Adipura. “Daerah yang bersih dan sehat lebih membanggakan daripada sekadar meraih Adipura,” tandasnya.

Soni Solistia Wirawan, Sekretaris Utama BPPT menambahkan untuk mendukung Gerakan Indonesia Bersih, BPPT sudah mengembangkan teknologi untuk pengolahan air limbah, sampah, dan pupuk. (Nda/N-3).

Situ Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, misalnya, luasnya dari 20 hektar menyusut ke 10 hektar karena okupasi untuk sekolah dan pusat belanja. Situ Cikaret, Cibinong, luasnya juga menyusut dari 50 hektar ke 30 hektar akibat pembangunan permukiman penduduk.

Guru Besar Arsitektur Lanskap IPB Hadi Susilo Arifin pernah mengatakan, program antisipasi banjir bisa dilakukan selain merehabilitasi situ. Caranya, membuat sodetan dan coakan di bantaran untuk menambah lahan tempat parkir air. (JAL/ART/BRO/PIN/ILO/DNA/MKN).

Longsor mestinya bisa dimitigasi. Perangkatnya ada dan bisa diproduksi para ahli dalam negeri dengan harga relatif terjangkau. Faisal bahkan mengeksport alat deteksi longsornya, Gama EWS. Sejak tahun 2012, alat itu dipakai di kawasan tambang di United Mercury Gorup Vietnam. "Tahun depan, kami kirim ke Kroasia," ujarnya.

Atas temuan itu, tahun 2013 Faisal juara pertama dosen berprestasi nasional oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penghargaan juga didapat dari International Programme on Landslides (IPL) UNESCO. Namun, bagi Faisal, penghargaan itu tak berarti banyak jika alatnya tak bisa menyelamatkan masyarakat.

"Beberapa daerah mulai datang minta bekerja sama memasang alat ini, misalnya BPBD Pekalongan," katanya. Tahun 2010, dua warga desa di Cilacap, Jawa Tengah, datang menemui Faisal di kampusnya. "Mereka hendak membeli alat kami. Uangnya sangat lecek, hasil iuran warga desa," katanya.

Faisal bergegas menelepon seniornya, ahli gempa yang kini Rektor UGM Dwi Korita Karnawati. Diputuskan bahwa UGM akan menyumbangkan alat deteksi dininya cuma-cuma. Bahkan, pihak swasta kemudian turut menyumbang. "Akhirnya, beberapa desa di Cilacap punya alat secara swadaya," katanya.

Bagaimanapun, kata Faisal, alat deteksi dini ini hanya satu komponen mitigasi bencana longsor. Lebih penting adalah adanya perubahan perspektif pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk lebih fokus mitigasi, bukan tanggap darurat. "Pemerintah cenderung sibuk setelah bencana terjadi. Apa upaya kita menyelamatkan masyarakat sebelum bencana itu harus jadi prioritas," tuturnya.

Yang terjadi, pendekatan mitigasi tak integrasi, misalnya peta rawan longsor buatan pemerintah kerap tumpang tindih dan tidak siap operasional. PVMBG punya peta rentan longsor seluruh Indonesia, tetapi pada 2012 Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuat lagi.

Lepas dari pendekatan bencana sebagai proyek, Deni Bram mengingatkan, merujuk UUD 1945, adalah hak konstitusional warga negara memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada kasus longsor Banjarnegara, negara gagal memberi perlindungan, setidaknya peringatan dini. Padahal, pemberitahuan diberikan ke tiap provinsi setiap bulan.